

Judul : Anggota Komisi V: Hapuskan Monopoli Penerbangan Nasional
Tanggal : Senin, 17 Juni 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tarif Pesawat Mahal Banget Anggota Komisi V: Hapuskan Monopoli Penerbangan Nasional

MELONJAKNYA harga tiket saat ini diyakini akibat tidak kompetitifnya keberadaan maskapai penerbangan nasional. Dengan dua maskapai penerbangan nasional yang tersisa, yakni Lion Air Group dan Garuda Indonesia Group menyebabkan persaingan usaha tidak sehat yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR Rendy M Affandy Lamadjido mengatakan, penerbangan nasional saat ini dikuasai dua grup tersebut. Makanya dia usul agar tidak terjadi monopoli di penerbangan nasional, ada baiknya pemerintah membuka selebar-lebarnya kepada pengusaha untuk merintis usaha penerbangan lain.

"Jujur selama ini yang terpenting dibuka kembali keran maskapai penerbangan baru seperti Tahun 2000 lalu di mana lahir beberapa maskapai seperti Batavia, Sriwijaya, Merpati, Adam Air, sebab sekarang ini tinggal dua perusahaan penerbangan yakni Garuda Group dan Lion Air Group. Makanya sekarang kompetisi tarif pesawat sudah tidak lagi bersaing secara sehat karena dimonopoli dua perusahaan ini," katanya.

Karena itu, dia meminta Kementerian Perhubungan mencabut adanya Peraturan Menteri mengenai batas 10 maskapai yang melayani rute penerbangan ke seluruh tanah air. Diharapkan dengan pencabutan peraturan terhadap jumlah maskapai nasional, akan lahir maskapai-maskapai baru yang bisa mendorong kompetisi lebih sehat.

"Dunia penerbangan tanah air kita ini sekarang sudah dimonopoli. Seperti Lion Air, Batik Air hingga Wings Air ini sudah mengengeram sehingga sulit bagi pemerintah untuk lakukan pengawasan dan pembinaan. Sekarang kan sudah ada dua, ya tambah saja dua perusahaan penerbangan

lagi. Yang penting pesawatnya ada dan bersedia ikuti aturan hukum yang berlaku," katanya.

Dia optimistis, dengan lebih banyak pengusaha yang terlibat dalam dunia penerbangan, tarif pesawat bisa ditekan. Yang penting, kata dia, tetap mengutamakan keselamatan penerbangan.

"Jadi bisa seperti Tahun 2000 lalu di mana banyak perusahaan penerbangan, masyarakat betul-betul merasakan murah tiket pesawat itu. Tapi yang penting pemerintah ikut andil. Jangan sampai karena tiket murah kemudian faktor paling penting dalam penerbangan, yakni faktor keselamatan diabaikan," harapnya.

Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Sukartono meminta pemerintah hati-hati mengeluarkan izin maskapai asing untuk beroperasi di dalam negeri. Menurutnya, gagasan untuk mengundang maskapai asing bersaing dalam industri penerbangan domestik sebagai salah satu solusi menurunkan tarif tiket pesawat, dikhawatirkan malah mengganggu konsistensi perusahaan yang ada sekarang.

Selain itu kehadiran maskapai asing bertentangan dengan prinsip penerbangan internasional. "Harus diingat juga bahwa kita menganut asas cabotage, di mana wilayah domestik harus dilayani airline dalam negeri," papar Bambang.

Karena itu, dia mewanti-wanti pemerintah tidak mengobral izin operasi bagi maskapai baru beroperasi di dalam negeri. Bagaimanapun, sambung dia, jumlah armada harus dikendalikan, bukan sebaliknya dilepas begitu saja ke pasar.

"Lagian kita sudah ada Air Asia sebagai airline asing sementara airline domestik masih over supply jika semua armadanya dijalankan dengan baik," paparnya. ■ KAL